

KONSTRUKSI SOSIAL STIGMA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA MAKASSAR: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

¹Nurazizah Rahmi R.✉, ¹Asmaul Husnah Amiruddin, ²M. Dissha Najiah Al Yas'a

¹Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²STISIP Trimasda, Cilegon, Serang, Indonesia

Email: nurazizah.rahmi@unm.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol16No1.pp43-50>

ABSTRACT

This study analyzes the social construction of stigma against children with special needs within the inclusive education system of Makassar City using a Systematic Literature Review (SLR) approach guided by the PRISMA 2020 protocol. Grounded in Goffman's stigma theory, labeling theory (Becker, 1963), and Berger and Luckmann's social construction framework (1966), this study examines how stigma is produced, reproduced, and negotiated at three levels: family, school institutions, and the Bugis-Makassar cultural community. A total of 24 verified sources from 2016 to 2025 were analyzed using a thematic-interpretive method. Findings reveal that stigma against ABK is multidimensional, shaped by the dialectics of Siri' na Pacce cultural values where Siri' reinforces stigmatization while Pacce holds potential to deconstruct it alongside structural deficiencies in inclusive education institutions and weak social protection mechanisms in schools. The viral bullying case at SMPN 4 Makassar (2024) serves as an empirical reflection of this systemic failure. This study recommends a local wisdom-based inclusion model integrating Sipakatau and Pacce values as the ethical foundation for inclusive education policy in Makassar.

Keyword: Children with Special Needs, Social Stigma, Inclusive Education, Siri' na Pacce, Sociology of Education.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konstruksi sosial stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam sistem pendidikan inklusif di Kota Makassar menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA 2020. Berlandaskan teori stigma Goffman, teori pelabelan (Becker, 1963), dan kerangka konstruksi sosial Berger serta Luckmann (1966), studi ini menganalisis bagaimana stigma diproduksi, direproduksi, dan dinegosiasikan pada tiga level: keluarga, institusi sekolah, dan komunitas budaya Bugis-Makassar. Sebanyak 24 sumber terverifikasi dari tahun 2016 hingga 2025 dianalisis menggunakan metode tematik-interpretatif. Temuan menunjukkan bahwa stigma terhadap ABK bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh dialektika nilai budaya Siri' na Pacce di mana Siri' memperkuat stigmatisasi sementara Pacce berpotensi mendekonstruksinya serta keterbatasan institusional pendidikan inklusif dan lemahnya mekanisme perlindungan sosial di sekolah. Kasus perundungan viral di SMPN 4 Makassar (2024) menjadi refleksi empiris atas kegagalan sistemik tersebut. Penelitian ini merekomendasikan model inklusi berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai Sipakatau dan Pacce sebagai fondasi etis kebijakan pendidikan inklusif di Makassar.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu agenda transformasi pendidikan global yang paling mendasar pada abad ke-21. Komitmen internasional yang tertuang dalam *Sustainable Development Goal* (SDG) ke-4 yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata telah mendorong berbagai negara untuk merombak sistem pendidikannya secara fundamental (Yang et al., 2025). Indonesia, sebagai salah satu negara penandatangan konvensi hak penyandang disabilitas PBB (CRPD), telah meletakkan fondasi normatif yang kuat melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas, 2009), yang kemudian diperkuat oleh Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Permendikbudristek, 2023), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Republik Indonesia, 2016). Namun, jarak antara komitmen normatif dan realitas lapangan masih sangat lebar, terutama di daerah-daerah dengan dinamika budaya yang kompleks seperti Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai pusat metropolitan terbesar di Kawasan Timur Indonesia menyajikan konteks yang sangat relevan untuk mengkaji fenomena stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Di sinilah modernitas urban bersinggungan secara dialektis dengan sistem nilai budaya Bugis-Makassar yang telah mengakar selama berabad-abad. Nilai *Siri' na Pacce* yang secara harfiah merujuk pada rasa malu (*Siri'*) dan rasa empati atau solidaritas (*Pacce*) membentuk peta moral masyarakat setempat sekaligus menjadi variabel kultural yang menentukan bagaimana ABK dipersepsi, diperlakukan, dan ditempatkan dalam tatanan sosial (Badewi, 2019). Kompleksitas ini menjadikan Makassar sebagai laboratorium sosial yang sangat kaya untuk studi stigma dan inklusi.

Stigma sosial terhadap ABK bukan merupakan fenomena baru dalam literatur sosiologi pendidikan. Erving Goffman (1963) dalam karya monumentalnya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* telah meletakkan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana atribut-atribut tertentu mengubah identitas individu dari yang utuh menjadi yang "tercemar" di mata masyarakat. Lebih dari enam dekade setelah Goffman menulis karya tersebut, stigma terhadap ABK masih menjadi realitas yang sulit dibendung di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Bahkan di tengah perkembangan regulasi inklusif yang masif, praktik-praktik diskriminatif yang bersumber dari stigma terus bertahan dalam berbagai bentuknya dari sikap keluarga yang menyembunyikan keberadaan anak dari lingkungan sosial, hingga praktik perundungan di sekolah yang kerap tidak ditindak secara serius oleh institusi.

Urgensi kajian ini semakin menguat setelah terjadinya kasus perundungan terhadap siswa penyandang disabilitas yang menjadi viral di SMPN 4 Makassar pada pertengahan tahun 2024. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin Mustakim, secara terbuka mengakui bahwa pihak sekolah baru mengetahui kejadian tersebut setelah video perundungan menyebar di media sosial (ANTARA News, 2024). Fakta ini mengungkap lebih dari sekadar kegagalan mekanisme pengawasan di satu sekolah tertentu; ia mencerminkan kedalaman dan persistensi stigma sosial yang masih mengakar dalam ekosistem pendidikan inklusif Makassar secara keseluruhan. Perundasan Dinas Pendidikan dengan mengangkat korban sebagai "duta pendidikan inklusi" merupakan respons simbolis yang penting, namun tanpa perubahan kultur sistemik yang mendasar, gestur tersebut berisiko menjadi sekadar pemadam kebakaran sesaat.

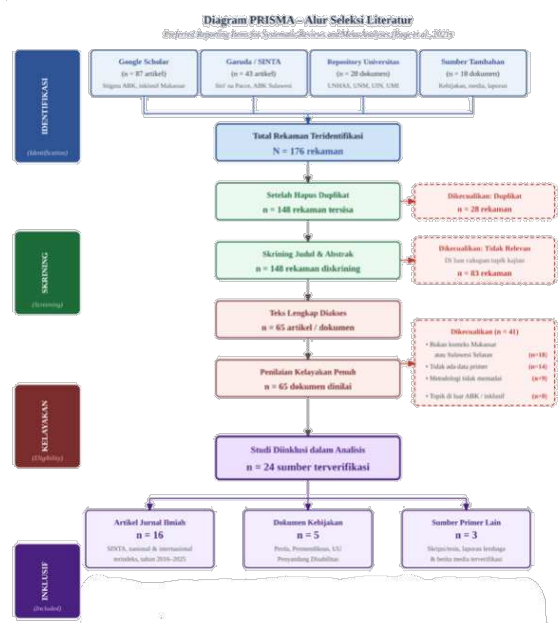
Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa penelitian tentang stigma ABK di Indonesia masih didominasi oleh perspektif psikologi individual dan pendekatan klinis,

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses konstruksi sosial stigma terhadap ABK di Kota Makassar pada tiga level analisis keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas budaya; (2) mengidentifikasi peran nilai budaya *Siri' na Pacce* dalam memperkuat sekaligus berpotensi mendekonstruksi stigma tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan model pendidikan inklusif yang lebih humanis, berkeadilan, dan berakar pada kearifan lokal Bugis-Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengikuti protokol PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*). Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan sintesis komprehensif atas temuan-temuan penelitian yang telah ada secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi, sehingga menghasilkan landasan bukti yang lebih kuat dibandingkan *narrative review* konvensional (Page et al., 2021). Sebagaimana didefinisikan oleh Uman (2011), *systematic review* dirancang untuk meminimalkan bias melalui strategi pencarian yang sistematis dan terencana sejak awal (*a priori*).

"konstruksi sosial ABK." Pencarian dilakukan pada bulan Januari 2026, dengan rentang waktu publikasi dibatasi dari tahun 2016 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dan kebaruan data.

Proses seleksi literatur mengikuti empat tahap PRISMA: identifikasi, skrining, penilaian kelayakan, dan inklusi. Dari total 176 rekaman yang teridentifikasi, sebanyak 28 dieliminasi sebagai duplikat, 83 dieksklusi berdasarkan skrining judul dan abstrak, dan 41 dieksklusi setelah penilaian teks lengkap. Akhirnya, 24 sumber ditetapkan sebagai dataset final yang memenuhi seluruh kriteria inklusi. Kriteria inklusi mencakup: (a) dipublikasikan antara 2016–2025; (b) relevan secara substantif dengan tema stigma ABK, pendidikan inklusif, atau budaya Bugis-Makassar; (c) memiliki data atau argumen yang dapat dilacak ke sumber primer; serta (d) memiliki identitas penulis yang jelas dan publikasi pada platform yang terverifikasi.



Gambar 1. Diagram PRISMA 2020

MAJALAH ILMIAH METHODODA *Volume 16, Nomor 1, Januari – April 2026: 43-50*
ISSN: 2088-9534 (*media cetak*) – ISSN: 2656-6931 (*media online*)

modal budaya dan kebijakan pendidikan. Untuk memastikan keterpercayaan (*trustworthiness*) analisis, dilakukan triangulasi sumber antara dokumen kebijakan resmi, artikel jurnal terindeks, dan pemberitaan media massa yang terverifikasi secara independen.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Tahun	2016–2025	Sebelum 2016
Bahasa	Indonesia dan Inggris	Selain Indonesia/Inggris
Subjek	ABK, keluarga ABK, guru inklusi, komunitas	Di luar konteks disabilitas
Publikasi	Jurnal SINTA, repositori resmi, dok. kebijakan	Tanpa identitas penulis
Relevansi	Stigma ABK, pendidikan inklusif, budaya Bugis-Makassar	Tidak relevan secara substantif
Basis Data	Google Scholar, Garuda, SINTA, Repository Univ.	Basis data tidak terverifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Berdasarkan data administratif Dinas Sosial Kota Makassar yang dikutip (Ashary, 2025), tercatat 1.274 jiwa penyandang disabilitas di Kota Makassar per tahun 2021. Distribusi berdasarkan jenis disabilitas menunjukkan bahwa disabilitas fisik merupakan kategori terbesar dengan 482 jiwa (37,83%), diikuti disabilitas ganda (Ganda SIMPD) sebanyak 290 jiwa (22,76%), tuna netra sebanyak 80 jiwa (6,28%), gangguan jiwa sebanyak 38 jiwa (2,98%), low vision sebanyak 39 jiwa (3,06%), kusta sebanyak 184 jiwa (14,45%), serta kategori lainnya termasuk autisme, tuna wicara, tuna runtu, down syndrome, lambat bicara, dan tuna grahita. Data ini perlu dibaca secara kritis karena merupakan pendataan administratif Dinas Sosial yang mencakup penyandang disabilitas yang terdaftar saja. Survei partisipatif yang lebih komprehensif yang dilakukan Kota Kita bersama UNESCO pada 2025 mencatat 5.171 penyandang disabilitas di 15 kecamatan dan 153 kelurahan Kota Makassar, termasuk wilayah kepulauan (UNESCO, 2026). Kesenjangan yang sangat signifikan antara kedua angka ini mengkonfirmasi adanya under-reporting yang masif dalam pendataan administratif.

Data tersebut perlu dibaca dengan kritis karena kemungkinan besar merupakan angka yang sangat di bawah kondisi aktual (*under-reported*).

Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, banyak keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya sebagai penyandang disabilitas karena tekanan nilai *Siri'* (rasa malu) yang terikat pada konsep kehormatan keluarga (Alamsyah, 2022). Fenomena ini menciptakan ironi yang serius: stigma itu sendiri menjadi hambatan dalam pengumpulan data akurat, yang pada gilirannya menghalangi perencanaan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.

Tabel 2. Distribusi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

No	Jenis Disabilitas	L	P	Jumlah	%
1	Lambat Bicara	14	7	21	1,65%
2	Autis SIMPD	15	8	23	1,81%
3	Gangguan Jiwa	24	14	38	2,98%
4	Tuna Wicara SIMPD	17	18	35	2,75%
5	Kusta SIMPD	94	90	184	14,45%
6	Down Syndrome	16	10	26	2,04%
7	Tuna Runtu	8	12	20	1,57%
8	Disabilitas Fisik	202	190	482	37,83%
9	Low Vision	21	18	39	3,06%
10	Ganda SIMPD	148	142	290	22,76%
11	Tuna Netra	45	35	80	6,28%
12	Tuna Grahita	14	22	36	2,83%
TOTAL		618	566	1.274	100%

Sumber: Diadaptasi dari Aulia (2025) berdasarkan Data Dinas Sosial Kota Makassar 2021.

Konstruksi Stigma pada Level Keluarga

Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memiliki pengaruh paling determinatif dalam pembentukan identitas sosial anak. Namun, studi ini menemukan bahwa keluarga juga dapat menjadi sumber utama stigma bagi ABK di Makassar. Penelitian Zaskia et al. (2025) menunjukkan bahwa *self-stigma* pada orang tua dari anak dengan hambatan intelektual secara signifikan menghambat akses anak terhadap layanan terapi, dukungan sosial, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Orang tua yang menginternalisasi stigma sosial terhadap disabilitas cenderung mengadopsi strategi "penyembunyian" menarik anak dari interaksi sosial publik sebagai upaya melindungi kehormatan keluarga.

Dalam sistem nilai Bugis-Makassar, keberadaan ABK berpotensi diposisikan sebagai kondisi yang dapat "menurunkan derajat" keluarga, sebuah kondisi yang dalam istilah lokal disebut *dipakkasiri'* (dipermalukan) (Alamsyah,

2022; Badewi, 2019; Rahmi R et al., 2025). Nilai *Siri'* yang sejatinya merupakan salah satu pilar etika sosial tertinggi masyarakat Bugis-Makassar, mengandung arti kehormatan, harga diri, dan rasa malu yang mendalam dalam konteks disabilitas justru dapat beroperasi sebagai mekanisme eksklusif yang kuat. Keluarga yang merasakan "tekanan *Siri'*" cenderung memilih isolasi sosial bagi anggotanya yang disabilitas sebagai strategi manajemen stigma, daripada mencari dukungan dan advokasi.

Di sisi lain, nilai *Pacce* yang merujuk pada rasa empati, solidaritas, dan ikut merasakan

penderitaan sesama menawarkan potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai modal sosial untuk mendukung inklusi ABK di Makassar. Secara teoritis, *Pacce* seharusnya mendorong keluarga dan komunitas untuk merangkul, bukan mengeksklusi, anggota yang rentan. Faktanya, nilai ini sering kali terpasung oleh tekanan norma sosial dominan yang mengutamakan menjaga "nama baik" keluarga dalam pandangan komunitas lebih luas (Badewi, 2019).

Tabel 3. Analisis Dimensi Stigma terhadap ABK di Kota Makassar

Dimensi Stigma	Manifestasi di Keluarga	Manifestasi di Sekolah	Dampak pada ABK	Sumber Referensi
Pelabelan (<i>Labeling</i>)	Penyebutan 'anak cacat,' menyembunyikan anak dari publik	Kategorisasi 'siswa bermasalah' tanpa asesmen formal	Internalisasi identitas negatif, rendahnya kepercayaan diri	(Goffman, 1963; Putra, 2022; Zaskia et al., 2025)
Stereotipifikasi	Asumsi ABK tidak produktif dan tidak punya masa depan	Ekspektasi akademis sangat rendah di kelas inklusif	<i>Self-fulfilling prophecy</i> : potensi tidak berkembang optimal	(Goffman, 1963; Link & Phelan, 2001; Zaskia et al., 2025)
Separasi Sosial	Pengucilan dari kegiatan keluarga besar dan acara komunitas	Segregasi non-formal: ABK duduk terpisah, tidak dilibatkan	Defisit keterampilan sosial, trauma relasional	(Aprilia et al., 2025; Link & Phelan, 2001; Putri et al., 2026)
Diskriminasi	Penolakan akses terapi karena dianggap 'sia-sia'	Perundungan yang dibiarkan, minimnya intervensi guru	Penarikan dari pendidikan, risiko putus sekolah	(Mutmainnah, 2023; UNESCO, 2026)

Sumber: Analisis berdasarkan Goffman (1963), Link & Phelan (2001), Aulia (2025), Adiputra et al. (2021), dan Kota Kita & UNESCO (2026).

Reproduksi Stigma di Institusi Pendidikan

Institusi sekolah memiliki peran yang ambigu dalam dinamika stigma terhadap ABK: ia dapat menjadi arena reproduksi stigma sekaligus laboratorium sosial yang berpotensi mendekonstruksinya. Implementasi pendidikan inklusif di Kota Makassar, meskipun telah mendapatkan landasan legal yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PERDA Kota Makassar, 2013), masih menghadapi hambatan struktural yang parah (Mutmainnah, 2023).

Studi Aprilia et al. (2025) di SDN Unggulan Mongisidi 1 Makassar menemukan bahwa meskipun sekolah tersebut secara formal berstatus sebagai sekolah inklusif, praktik-praktik eksklusif informal masih berlangsung dalam keseharian interaksi kelas. Stigma institusional termanifestasi dalam tiga bentuk utama: pertama, minimnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang terlatih

dan berdedikasi, kondisi yang memaksa guru kelas reguler menangani ABK tanpa pelatihan memadai dan sering kali melahirkan pandangan bahwa ABK adalah "beban tambahan." Kedua, infrastruktur fisik yang tidak ramah disabilitas mengirimkan pesan simbolis bahwa ABK bukan prioritas dalam komunitas sekolah tersebut. Ketiga, ekspektasi akademis yang seragam tanpa akomodasi yang layak bagi ABK menciptakan kondisi di mana kegagalan akademis ABK menjadi "bukti" inferioritas yang memperkuat stereotip yang ada.

Hambatan struktural serupa ditemukan dalam konteks sekolah inklusif di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Makassar. Putri et al. (2026) menemukan bahwa ketiadaan instrumen identifikasi formal dan minimnya GPK menjadi hambatan struktural paling signifikan yang menghambat implementasi pendidikan inklusif yang bermakna. Temuan ini mengindikasikan bahwa problem institusional

yang menghasilkan dan mereproduksi stigma bukan hanya persoalan individual atau kultural semata, melainkan merupakan kegagalan sistemik yang membutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perundungan sebagai Kulminasi Stigmatisasi: Kasus SMPN 4 Makassar

Dinamika stigmatisasi di lingkungan sekolah mencapai titik kulminasinya dalam tindakan perundungan (*bullying*). Kasus viral di SMPN 4 Makassar pada tahun 2024, di mana seorang siswa penyandang disabilitas fisik mengalami perundungan berulang dari sejumlah teman sekelasnya, menjadi cermin nyata dari kegagalan sistemik pendidikan inklusif yang selama ini tertutupi oleh narasi keberhasilan administratif (ANTARA News, 2024; Hadjidakou & Hartas, 2008). Dalam kerangka Goffman, kasus ini mengilustrasikan bagaimana “identitas yang tercemar” (*spoiled identity*) yang dilekatkan pada ABK memicu proses dehumanisasi yang pada akhirnya membuka ruang bagi kekerasan.

Fakta bahwa pihak sekolah baru mengetahui kejadian perundungan tersebut setelah video viral di media sosial merupakan indikator kegagalan ganda: kegagalan sistem pengawasan sosial internal sekolah, dan kegagalan kultur sekolah yang tidak menciptakan ruang aman bagi korban untuk melapor. Respons Dinas Pendidikan Kota Makassar mengangkat korban sebagai "duta pendidikan inklusi" merupakan gestur simbolis yang penting untuk pemulihan harga diri korban dan mengirimkan sinyal publik tentang komitmen inklusif. Namun, tanpa disertai reformasi struktural yang fundamental termasuk penambahan GPK yang kompeten, pelatihan anti-perundungan bagi guru, dan sistem pelaporan yang aman dan terpercaya bagi siswa, respons simbolis tersebut tidak cukup untuk mengubah realitas di lapangan.

Analisis Empat Dimensi Stigma

Mengacu pada kerangka analitis Link & Phelan (2001) yang mengidentifikasi empat komponen utama stigma, pelabelan, stereotipifikasi, separasi sosial, dan diskriminasi, studi ini menemukan bahwa keempat dimensi tersebut beroperasi secara simultan dan saling

memperkuat dalam konteks ABK di Makassar. Pelabelan berlangsung sejak dini ketika anak diidentifikasi memiliki kebutuhan khusus, baik secara formal melalui diagnosis medis maupun secara informal melalui pelabelan sosial oleh lingkungan sekitar. Stereotipifikasi kemudian mengasosiasikan label tersebut dengan atribut-atribut negatif tidak mampu, tidak produktif, tidak punya masa depan yang secara tidak sadar diadopsi bahkan oleh keluarga terdekat ABK.

Separasi sosial terjadi ketika perbedaan antara "normal" dan "tidak normal" diubah menjadi jarak sosial yang nyata: ABK duduk terpisah di kelas, tidak diajak dalam kegiatan kelompok, atau tidak diundang dalam acara keluarga besar. Diskriminasi sebagai manifestasi paling nyata stigma terwujud dalam penolakan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas, marginalisasi dalam interaksi sosial, dan dalam kasus ektrim, kekerasan verbal maupun fisik seperti yang terjadi di SMPN 4 Makassar.

Dialektika Nilai *Siri'* na Pacce dan Potensi Dekonstruksi Stigma

Analisis dialektis terhadap nilai *Siri' na Pacce* mengungkapkan kompleksitas yang tidak dapat disederhanakan menjadi dikotomi sederhana antara "penghambat" dan "pendukung" inklusi. Nilai *Siri'* beroperasi paling kuat pada dimensi separasi sosial dan pelabelan di tingkat keluarga, menciptakan insentif kultural untuk menyembunyikan atau mengisolasi ABK dari ranah publik. Namun, nilai ini juga mengandung potensi positif: rasa malu terhadap perilaku tidak etis termasuk perlakuan diskriminatif terhadap yang lemah dapat diaktifkan sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mendorong perilaku pro-inklusi.

Falsafah *Sipakatau* (saling memanusiakan) yang merupakan salah satu nilai inti dalam sistem etika Bugis-Makassar mengandung etika inklusi yang jauh lebih kaya dari yang selama ini dimanfaatkan dalam kebijakan pendidikan daerah. *Sipakatau* menegaskan bahwa setiap manusia, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya, memiliki martabat dan nilai yang setara dan harus diperlakukan dengan hormat dan empati (Badewi, 2019; Rahmi R et al., 2025). Jika nilai ini diaktualisasikan secara konsisten dalam kebijakan

dan praktik pendidikan inklusif, ia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pendorong transformasi kultural yang sangat signifikan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang benar-benar inklusif bagi ABK di Makassar.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa stigma terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Makassar merupakan konstruksi sosial yang bersifat multidimensional, beroperasi secara simultan pada tiga level analisis: keluarga, institusi sekolah, dan komunitas budaya Bugis-Makassar. Stigma ini tidak hadir secara alamiah, melainkan diproduksi dan direproduksi melalui interaksi sosial yang berulang yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai level tersebut.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya Siri' na Pacce bekerja secara dialektis dalam konteks ABK. Siri' dapat memperkuat stigmatisasi melalui mekanisme eksklusi berbasis rasa malu, sementara Pacce dan Sipakatau menawarkan potensi dekonstruksi stigma melalui etika empati dan humanisasi. Kasus perundungan di SMPN 4 Makassar bukan anomali, melainkan gejala dari kegagalan sistemik yang lebih dalam yang meliputi defisit GPK yang kompeten, infrastruktur inklusif yang tidak memadai, dan kultur sekolah yang belum sungguh-sungguh merangkul keberagaman.

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model inklusi berbasis kearifan lokal (local wisdom-based inclusion model) yang mengintegrasikan nilai-nilai Sipakatau, Pacce, dan Siri' secara reflektif ke dalam kurikulum pendidikan karakter, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah inklusif di Makassar. Agenda prioritas meliputi: peningkatan kapasitas dan jumlah GPK yang terlatih secara kultural; pengembangan sistem perlindungan siswa ABK yang aman dan responsif; serta program pemberdayaan keluarga yang memanfaatkan jaringan sosial komunitas Bugis-Makassar sebagai fasilitator inklusi organik. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan etnografi atau fenomenologi untuk menangkap pengalaman hidup (lived experience) ABK dan keluarganya secara lebih mendalam dimensi yang tidak dapat

ditangkap oleh pendekatan SLR yang digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. (2022). Implementasi Budaya Siri'Na Pacce Di Tengah Arus Kebudayaan Populer. *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial dan Budaya*, 3(1), 1-15..
- ANTARA News. (2024, June 16). *PPDI Sulsel dorong evaluasi pendidikan inklusif usai viral kasus perundungan*. Antara News Makassar.
<https://makassar.antaranews.com/berita>
- Aprilia, F. N., Ansar, A., Ekayanti, P., Ramadha, W., & Arismunandar. (2025). Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Unggulan Mongisidi I: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 11433–11440.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3675>
- Ashary, M. A. A. (2025). *Perumahan Disabilitas Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.
- Badewi, M. H. (2019). Nilai Siri' dan Pesse dalam Kebudayaan Bugis-Makassar, dan Relevansinya terhadap Penguatan Nilai Kebangsaan. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(1), 79–96.
<https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3291>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2011). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes On The Management Of Spoiled Identity*. Prentice-Hall.
- Hadjikakou, K., & Hartas, D. (2008). Higher education provision for students with disabilities in Cyprus. *Higher Education*, 55(1), 103–119.
<https://doi.org/10.1007/s10734-007-9070-8>
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2019). Perspektif Orang Tua Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(2), 72–91.
<https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing Stigma. *Annual Review of Sociology*, 27(Volume 27, 2001), 363–385.
<https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.363>
- Mutmainnah, M. (2023). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Education and Social*

- Sciences*, 2(1), 34–43.
<https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.392>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71.
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- PERDA Kota Makassar. (2013). *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Database Peraturan | JDIH BPK.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/48483/per-da-kota-makassar-no-6-tahun-2013>
- Permendikbudriset No. 48 Tahun 2023, Pub. L. No. BN 2023 (612) (2023).
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/285711/permendikbudriset-no-48-tahun-2023>
- Permendiknas no 70 tahun 2009 : Tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (2009).
[//pustaka.kemendikdasmen.go.id%2Flibdikbud%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D37367](http://pustaka.kemendikdasmen.go.id%2Flibdikbud%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D37367)
- Putra, F. (2022). Pelaksanaan pendampingan dalam proses pembelajaran siswa tunanetra di sekolah inklusif. *Jurnal Unik: Pendidikan Luar Biasa*, (Query date: 2025-03-08 00:39:34).
<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/UNIK/article/view/14078>
- Putri, R. S., Wardany, O. F., Mubar, M. M., Meidina, T., & Sulasminah, D. (2026). Hambatan Guru dalam Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif X Kabupaten Gowa. *Jurnal Basicedu*, 10(1), 52–61.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i1.11608>
- Rahmi R, N., Ruyadi, Y., & Wilodati. (2025). Aktualisasi Nilai Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Bugis-Makassar Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)*, 10(1), 57–71.
- Republik Indonesia. (2016). *UU No. 8 Tahun 2016*.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- UNESCO. (2026). *UNESCO and Kota Kita Hands Over the First Disability-Inclusive City*.
<https://www.unesco.org/en/articles/unesco-and-kota-kita-hands-over-first-disability-inclusive-city-profile-makassar-support-inclusive>
- Yang, C., Wang, T., & Xiu, Q. (2025). Towards a Sustainable Future in Education: A Systematic Review and Framework for Inclusive Education. *Sustainability (Switzerland)*, 17(9). Scopus.
<https://doi.org/10.3390/su17093837>
- Zaskia, A. H., Maulidina, C. A., Azalia, V., Fadilah, A., & Harum, T. M. (2025). Pengaruh Stigma Sosial Terhadap Anak Dengan Hambatan Intelektual. *Jurnal UNIK: Pendidikan Luar Biasa*, 9(2), 111–120.
<https://doi.org/10.30870/unik.v9i2.30536>